

PERSIAPAN PEMBENTUKAN PROVINSI KOTA WARINGIN Studi pada Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kota Waringin (BP3K)

 Oleh: HASBI AL FIKRI (04230008)

Government Science

Dibuat: 2008-11-18 , dengan 2 file(s).

Keywords: Pemekaran Kalimantan Tengah dan Pembentukan Provinsi Kotawaringin.

Perubahan paradigma pemerintahan daerah yang semula sentralistis di masa orde baru, menuju paradigma yang desentralistis dan demokratis di masa reformasi, dalam pelaksanaannya di tingkat lokal tidaklah mudah dan seringkali memunculkan beberapa masalah yang hampir-hampir tidak pernah di duga sebelumnya. Konsekuensi di terapkannya UU otonomi daerah tersebut melahirkan kompleksitas persoalan yang luar biasa di sejumlah daerah. Hal tersebut dapat di lihat dari munculnya berbagai dinamika politik lokal yang terjadi di berbagai daerah. Salah satu persoalan yang muncul adalah maraknya wacana pemekaran daerah yang terjadi baik di tingkatan Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Dari beberapa wacana pemekaran daerah yang ada, wacana pemekaran yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi satu persoalan yang menarik untuk dikaji. Beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah sepakat untuk memisahkan diri dari Kalimantan Tengah dan membentuk Provinsi baru yakni Provinsi Kotawaringin. Adapun Kabupaten tersebut ialah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Sukamara.

Pemekaran daerah adalah pemecahan Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran merupakan pembentukan daerah otonom baru. Oleh sebab itu, pembentukan daerah otonom baru dapat berarti pula perluasan terhadap lokus kekuasaan di daerah. Dalam rangka pembentukan Provinsi Kotawaringin, telah dibentuk Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kotawaringin (BP3K) yang berfungsi sebagai wadah untuk mengakomodir dan memfasilitasi segala macam aktivitas dan urusan yang berkaitan dengan pembentukan Provinsi Kotawaringin. Penelitian ini difokuskan pada persiapan BP3K dalam pembentukan Provinsi Kotawaringin. Adapun indikator penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa saja yang melatarbelakangi munculnya wacana pembentukan Provinsi Kotawaringin dan sejauh mana persiapan BP3K dalam pembentukan Provinsi Kotawaringin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya wacana pembentukan Provinsi Kotawaringin. Adapun faktor tersebut adalah: (a) Belum adanya pemekaran Provinsi di Pulau Kalimantan. (b) Luas wilayah Kalimantan Tengah yakni 153.564 Km² atau 1,5 kali luas Pulau Jawa. (c) Dinamika pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah cukup lamban, karena ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. (d) Jarak ibukota Kabupaten ke ibukota Provinsi terlalu jauh, sehingga mengakibatkan pembangunan berjalan lamban, pelayanan menjadi kurang maksimal dan tidak efektif serta pengendalian dan pengawasan sulit dilakukan. (e) Kondisi penghubung antar daerah di Kalimantan Tengah tidak memadai. (f) Tidak meratnya pembangunan antara wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan selatan menjadikan kecemburuan di antara beberapa Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. (g) 5 Kabupaten calon Provinsi Kotawaringin merupakan penyumbang terbesar APBD Kalimantan Tengah yakni

50%. (h) Keinginan menyatukan kembali daerah kesultanan yang ada di Kalimantan Tengah. Sedangkan persiapan pembentukan Provinsi Kotawaringin yang telah dilakukan oleh BP3K adalah menjangkau aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan dan mengumpulkan Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.

Melihat hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah pembentukan Provinsi Kotawaringin menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dipenuhi mengingat beragam permasalahan yang telah disebutkan di atas menjadikan alasan yang kuat untuk segera terbentuknya sebuah Provinsi baru. Apalagi wacana pembentukan Provinsi Kotawaringin adalah murni aspirasi dari sebagian besar masyarakat Kotawaringin yang menghendaki adanya perubahan nasib terhadap kemajuan pembangunan di Kalimantan tengah. Mengingat pembentukan sebuah daerah baru bukanlah perkara yang gampang karena memerlukan pertimbangan yang matang dan memakan waktu dan biaya yang banyak. Oleh sebab itu, perlu kekompakan dan semangat kerja keras dari BP3K untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Kotawaringin. "NKRI harga Mati, Provinsi Kotawaringin harga Pasti".

Change of paradigm governance of area which initially centralist in a period of new order, going to paradigm which is decentralist and democratic in a period to reform, in its execution in local storey level is not easy and oftentimes peep out some problem of which on the verge of have never in anticipating previously. Consequence in applying of autonomous UU of the area bear remarkable problem complexity in a number of area. The mentioned earn in seeing from appearance various local political dynamics that happened in various area. One of the problem which emerge is the hoisterous of discourse dissociation of area that happened either in level of Province and also in level Sub-Province/town.

From some discourse dissociation of existing area, discourse of dissociation that happened in Province central Kalimantan become one interesting problem to be studied. Some Sub-Province in central Kalimantan of agreement to cut loose from central Kalimantan and form new Province and namely Province is Province Kotawaringin. As for the Sub-Province is West Kotawaringin, East Kotawaringin, Lamandau, Seruyan, and Sukamara.

Area dissociation is dissociation of Province or Sub-Province/town become two area or more. Dissociation represent forming of otonomous area newly. On that account, forming of otonomous area newly can mean also extension to power locus in area. In order to forming of Province Kotawaringin, Body Worker of Forming of Province Kotawaringin (BP3K) as place of to accomodate and facility all kinds of business and activity related to forming of Province Kotawaringin. This Research is focussed by at preparation of BP3K in forming of Province Kotawaringin. As for this research indicator aim to for just to descriptions where of which is discourse appearance background forming of Province Kotawaringin and how far preparation of BP3K in forming of Province Kotawaringin. This Research use type research of deskriptif with approach qualitative. As for data collecting technique the used is interview method, observation, and documentation.

Pursuant to research which have been conducted, there are some factor which is discourse appearance background forming of Province Kotawaringin. As for the factor is: (a) There is no him dissociation of Province in Island of Kalimantan. (b) Wide of region of central Kalimantan

namely 153.564 Km² or 1,5 times wide of Java. (c) Dynamics development of area in slowgoing central Kalimantan enough, because availability of less adequate infrastructure. (d) Apart capital of regency to capital of Province too far, so that result development walk slowgoingly, service become less maximal and is not effective and also difficult observation and operation. (e) the Condition of interregional link in central Kalimantan is not adequate. (f) Do not its development between region of central Kalimantan of south and upstate make jelaousy among some Sub-Province exist in central Kalimantan. (g) 5 Sub-Province candidate of Province Kotawaringin represent biggest contributor of APBD central Kalimantan namely 50%. (h) Desire reunite Sultanate area exist in central Kalimantan.

While preparation of forming of Province Kotawaringin which have been conducted by BP3K is to net aspiration most local society in the form of Decision of BPD for the Countryside of and Forum Communications Sub-District or other name for Sub-District in region becoming regional coverage candidate of Province or Sub-Province/town to be dissociated and collect Decree (SK) DPRD Sub-Province/town pursuant to aspiration most local society.

See result of conducted research, conclusion of which can taken by is to forming of Province Kotawaringin become a requirement which must is immediately fulfilled to remember mass immeasurable which have been mentioned by above making the reason of strong to immediately forming of a new Province. More than anything else discourse forming of Province Kotawaringin is aspiration purification from most society of Kotawaringin wanting the existence of change of chance to progress of development in central Kalimantan. Considering forming a new area is not easy case because needing matured consideration and eat expense and time which many. On that account, solidarity require to and spirit of hard work of BP3K to realize to be formed of Province Kotawaringin. " NKRI Dead Price, Province Kotawaringin Set Price " .